



Psikotes: Jurnal Ilmu Psikologi, Komunikasi, dan Kesehatan Masyarakat
Vol. 3 No.1 Maret 2026

**PERAN MEDIA DAN STRATEGI KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN
DALAM MENGELOLA KONFLIK SOSIAL:
TINJAUAN LITERATUR KOMUNIKASI PEMBANGUNAN**

Sukri M, Sarmiati

Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding E-mail: msyukritanjung484@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the role of communication in managing social conflict from the perspective of development communication with a focus on empowerment. Social conflict is often viewed as a failure of development; however, this study argues that conflict also reflects inequalities in communication processes and access to media. The objective of this study is to analyze how media and empowerment-based communication strategies contribute to conflict management within development contexts. Using a narrative literature review with a systematic approach, this study analyzes scholarly articles published over the last 10–15 years from national and international journals. Thematic synthesis is employed to identify key patterns related to media roles, participatory communication, and empowerment strategies. The findings indicate that media can function both as a catalyst and a mediator of conflict, depending on communication practices, while empowerment-oriented strategies such as community participation, dialogue, and media literacy play a crucial role in reducing conflict escalation. The study concludes that integrating empowerment principles into development communication enhances conflict management effectiveness.

Keywords: *Communication For Development, Empowerment Communication, Social Conflict*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC- BY International license. E-ISSN: 3032-2421, DOI: 10.59548/ps.v3i1.581

Pendahuluan

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Perubahan sosial yang dipicu oleh pembangunan baik dalam bentuk modernisasi, industrialisasi, maupun transformasi digital sering kali melahirkan ketegangan kepentingan di tengah masyarakat. Ketimpangan akses sumber daya, perbedaan identitas sosial, serta lemahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor yang kerap memicu konflik sosial. Dalam konteks ini, konflik tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan pembangunan, melainkan sebagai indikator adanya persoalan struktural dan komunikasi yang belum terkelola secara efektif.(Willia Novi Aryani et al., 2025)

Komunikasi memiliki peran sentral dalam dinamika konflik sosial. Selama ini, konflik kerap dipahami sebagai akibat dari miskomunikasi, distorsi pesan, atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Namun, perspektif komunikasi pembangunan memandang komunikasi tidak hanya sebagai sumber masalah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik. Komunikasi yang dirancang secara partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berpotensi meredam eskalasi konflik sekaligus mendorong terciptanya perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(Mefalopulos, 2008)

Perkembangan media, khususnya media massa dan media digital, turut memperumit sekaligus membuka peluang dalam pengelolaan konflik sosial. Media berfungsi sebagai arena tempat berbagai kepentingan, narasi, dan ideologi saling berinteraksi. Di satu sisi, media dapat memperkeruh konflik melalui framing yang bias, sensasionalisme, atau penyebaran disinformasi. Di sisi lain, media juga memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi, dialog publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka komunikasi pembangunan, media tidak hanya diposisikan sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong kesadaran kritis, partisipasi, dan transformasi sosial.(Servaes, 2020)

Strategi komunikasi pemberdayaan menurut (Ruback & Thompson, 2015) menjadi pendekatan penting dalam mengelola konflik sosial. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek, bukan objek komunikasi. Melalui komunikasi dua arah, dialog komunitas, dan penguatan kapasitas literasi media, masyarakat didorong untuk memahami akar konflik, mengekspresikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, komunikasi pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi konflik di masa depan.

Meskipun kajian mengenai konflik sosial dan peran media telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih cenderung melihat kedua aspek tersebut secara terpisah atau dalam perspektif media dan konflik semata. Menurut (Wilkins et al., 2014) Studi yang secara khusus mengintegrasikan peran media dan strategi komunikasi pemberdayaan dalam kerangka komunikasi pembangunan masih relatif terbatas. Padahal, integrasi perspektif ini penting untuk memahami bagaimana komunikasi dapat berfungsi secara strategis dalam mengelola konflik sosial sekaligus mendorong perubahan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis literatur mengenai peran media dan strategi komunikasi pemberdayaan dalam mengelola konflik sosial dalam perspektif komunikasi pembangunan. Melalui pendekatan literature review, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai hubungan antara media, konflik sosial, dan komunikasi pemberdayaan, serta menawarkan implikasi teoretis dan praktis bagi pengembangan strategi komunikasi pembangunan di masa depan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dengan tipe naratif yang diperkaya dengan prosedur sistematis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran media dan strategi komunikasi pemberdayaan dalam mengelola konflik sosial dari perspektif komunikasi pembangunan. Menurut (Snyder, 2019) Literature review naratif memungkinkan peneliti untuk mensintesis berbagai temuan konseptual dan empiris, sekaligus mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta kesenjangan penelitian yang relevan dengan topik kajian.

A. Sumber Data

Menurut (Haddaway et al., 2015) Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik yang kredibel. Penelusuran artikel dilakukan melalui beberapa basis data, yaitu Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), serta jurnal nasional terakreditasi yang berfokus pada bidang komunikasi, pembangunan, dan media. Pemilihan sumber ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan relevansi literatur yang dianalisis, sekaligus memastikan keterwakilan konteks global dan Indonesia dalam kajian komunikasi pembangunan.

B. Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain: komunikasi pembangunan, konflik sosial, peran media, komunikasi pemberdayaan, serta media dan konflik. Kata kunci tersebut digunakan secara tunggal maupun dikombinasikan untuk memperoleh hasil pencarian yang lebih spesifik dan komprehensif. Proses penelusuran dilakukan secara bertahap dengan

memperhatikan kesesuaian judul, abstrak, dan isi artikel dengan tujuan penelitian.(Snyder, 2019)

C. Kriteria Inklusi Literatur

Untuk menjaga fokus dan kualitas kajian, penelitian ini menetapkan beberapa kriteria inklusi. Pertama, artikel yang dianalisis merupakan publikasi ilmiah yang terbit dalam rentang waktu 10 hingga 15 tahun terakhir, sehingga tetap relevan dengan perkembangan terkini dalam kajian komunikasi pembangunan. Kedua, literatur yang dipilih harus memiliki fokus pada isu komunikasi, media, konflik sosial, dan pembangunan, baik secara konseptual maupun empiris. Ketiga, artikel yang dianalisis ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang memiliki reputasi akademik.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic synthesis)(Thomas & Harden, 2008). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai literatur terkait peran media dan strategi komunikasi pemberdayaan dalam mengelola konflik sosial. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca secara mendalam setiap artikel, mengelompokkan gagasan utama, mengidentifikasi pola dan perbedaan temuan, serta mensintesis hasil kajian ke dalam tema-tema konseptual yang relevan. Hasil analisis tematik ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Konflik Sosial dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan

Dalam perspektif komunikasi pembangunan menurut (Besio et al., 2008a), konflik sosial dipahami sebagai bagian yang inheren dari dinamika sosial masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Proses pembangunan baik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, modernisasi, maupun transformasi sosial secara alamiah membawa pergeseran nilai, kepentingan, dan relasi kekuasaan. Pergeseran tersebut sering kali memunculkan ketegangan antarindividu, kelompok, atau antara masyarakat dengan institusi, yang kemudian termanifestasi dalam bentuk konflik sosial. Dengan demikian, konflik tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan sosial yang menyertai pembangunan itu sendiri.

Literatur komunikasi pembangunan menunjukkan bahwa konflik sosial tidak selalu bersifat destruktif. Sebaliknya, konflik dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menandakan adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam proses pembangunan. Konflik muncul ketika aspirasi, kebutuhan, atau kepentingan kelompok tertentu tidak terakomodasi secara memadai dalam proses komunikasi pembangunan(Bar-Tal, 2000).

Dalam konteks ini, konflik menjadi bentuk ekspresi sosial yang menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara aktor pembangunan seperti pemerintah, lembaga swasta, dan media dengan masyarakat sebagai penerima dampak pembangunan.

Lebih lanjut, konflik sosial dalam komunikasi pembangunan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan kepentingan material, tetapi juga oleh ketimpangan dalam akses terhadap informasi dan partisipasi. Banyak studi menegaskan bahwa pembangunan yang bersifat top-down, minim dialog, dan kurang melibatkan masyarakat cenderung melahirkan resistensi sosial. Ketika masyarakat tidak diberi ruang untuk menyuarakan pandangan dan pengalaman mereka, komunikasi pembangunan kehilangan fungsi dialogisnya dan berubah menjadi instrumen legitimasi kebijakan semata. Kondisi inilah yang sering kali memicu konflik laten yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.

Dari sudut pandang komunikasi pembangunan, konflik sosial tidak dapat dipahami sebagai kegagalan pembangunan secara keseluruhan, melainkan sebagai indikator adanya masalah dalam proses komunikasi. Konflik menandai bahwa pesan pembangunan tidak tersampaikan secara efektif, tidak dipahami secara utuh, atau tidak sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Dengan kata lain, konflik merefleksikan ketimpangan komunikasi baik dalam hal distribusi informasi, framing pesan, maupun relasi kuasa antara komunikator dan komunikan dalam pembangunan.

Oleh karena itu, pendekatan komunikasi pembangunan mendorong pemaknaan ulang terhadap konflik sosial. Alih-alih dipandang sebagai ancaman yang harus ditekan atau dihilangkan, konflik perlu diposisikan sebagai peluang untuk melakukan koreksi terhadap strategi komunikasi yang digunakan. Melalui komunikasi yang partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada pemberdayaan, konflik dapat dikelola secara konstruktif sehingga menjadi pintu masuk bagi terciptanya perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif. Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik atau ekonomi, tetapi juga dari kemampuan komunikasi dalam menjembatani perbedaan, mengelola konflik, dan memperkuat kohesi sosial.

B. Peran Media dalam Dinamika Konflik Sosial

Media memiliki posisi strategis dalam dinamika konflik sosial, khususnya dalam konteks komunikasi pembangunan. Menurut (Besio et al., 2008) Literatur menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan aktif dalam membentuk realitas sosial. Cara media memilih isu, membingkai peristiwa, dan menyajikan aktor-aktor konflik sangat memengaruhi bagaimana konflik dipahami oleh publik. Oleh karena itu, media dapat berkontribusi baik sebagai pemicu eskalasi konflik maupun sebagai instrumen pengelolaan dan resolusi konflik.

Sebagai penyampai informasi, media berperan dalam mendistribusikan fakta, data, dan narasi terkait konflik sosial kepada masyarakat luas. Dalam konteks pembangunan, media menjadi penghubung antara pembuat kebijakan, aktor konflik, dan publik. Informasi yang akurat, berimbang, dan kontekstual dapat membantu masyarakat memahami akar konflik, kepentingan yang terlibat, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Namun, literatur juga menegaskan bahwa keterbatasan verifikasi, tekanan kecepatan, serta kepentingan ekonomi dan politik media sering kali menyebabkan penyederhanaan informasi. Akibatnya, konflik disajikan secara parsial dan kehilangan kompleksitas sosialnya, yang justru berpotensi memperkuat kesalahpahaman dan ketegangan di tingkat masyarakat.

Selain sebagai penyampai informasi, media juga berfungsi sebagai pembentuk opini publik. Melalui proses framing, media menentukan aspek konflik mana yang ditonjolkan dan aspek mana yang diabaikan. Pemilihan narasumber, penggunaan diksi, visualisasi, serta penekanan tertentu dalam pemberitaan membentuk cara pandang publik terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, pembentukan opini publik ini menjadi krusial karena dapat memengaruhi legitimasi kebijakan, sikap masyarakat terhadap kelompok tertentu, serta arah dukungan publik. Media yang mengedepankan framing konflik secara hitam-putih, misalnya antara “pihak benar” dan “pihak salah”, cenderung memperkuat polarisasi sosial dan mempersempit ruang dialog.

Lebih jauh, media dapat berperan sebagai pemicu atau peredam konflik sosial. Sebagai pemicu, media berkontribusi pada eskalasi konflik ketika mengedepankan sensasionalisme, konflik identitas, atau narasi provokatif tanpa konteks yang memadai. Pemberitaan yang menekankan aspek kekerasan, perbedaan etnis, agama, atau kelompok sosial tertentu dapat memperkuat prasangka dan mempercepat penyebaran emosi kolektif. Sebaliknya, media juga memiliki potensi besar sebagai peredam konflik apabila menjalankan fungsi edukatif dan dialogis. Pemberitaan yang berimbang, menghadirkan berbagai perspektif, serta menekankan solusi dan proses dialog dapat membantu mereduksi ketegangan dan mendorong pemahaman lintas kelompok.

Peran media dalam konflik sosial semakin kompleks dengan hadirnya perbedaan karakter antara media arus utama dan media digital. Media arus utama umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih mapan, mekanisme gatekeeping, serta standar jurnalistik yang relatif jelas. Dalam banyak literatur, media arus utama dinilai memiliki kapasitas untuk menjaga akurasi dan kredibilitas informasi. Namun, media ini juga tidak lepas dari kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis yang dapat memengaruhi independensi pemberitaan konflik.

Sementara itu, media digital termasuk media sosial menawarkan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Media digital memungkinkan individu dan kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk menyuarakan pengalaman, keluhan, dan aspirasi mereka secara langsung. Dalam konteks konflik sosial, media digital dapat menjadi sarana

pemberdayaan dengan membuka ruang dialog horizontal dan mempercepat mobilisasi solidaritas sosial. Namun, literatur juga menyoroti risiko media digital sebagai ruang yang rentan terhadap disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi. Minimnya proses verifikasi serta algoritma yang mendorong konten emosional sering kali mempercepat eskalasi konflik dibandingkan upaya penyelesaiannya.

Dalam perspektif komunikasi pembangunan, tantangan utama bukan memilih antara media arus utama atau media digital, melainkan bagaimana mengintegrasikan peran keduanya secara strategis. Media perlu diarahkan tidak hanya untuk menyampaikan informasi konflik, tetapi juga untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui literasi media, dialog publik, dan partisipasi yang bermakna. Dengan demikian, media dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial yang membantu masyarakat memahami konflik secara kritis, sekaligus sebagai instrumen komunikasi yang mendukung perubahan sosial yang damai dan berkelanjutan.

C. Strategi Komunikasi Pemberdayaan dalam Mengelola Konflik

Strategi komunikasi pemberdayaan menempati posisi sentral dalam upaya mengelola konflik sosial dalam perspektif komunikasi pembangunan. Berbeda dengan pendekatan komunikasi konvensional yang bersifat top-down dan instruktif, komunikasi pemberdayaan menekankan proses dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan kapasitas masyarakat (Prensky, 2012). Literatur menunjukkan bahwa konflik sosial tidak dapat dikelola secara efektif hanya melalui kebijakan atau intervensi struktural, tetapi memerlukan strategi komunikasi yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subjek perubahan sosial.

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam strategi komunikasi pemberdayaan. Dalam konteks konflik sosial, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan simbolik, tetapi sebagai keterlibatan nyata masyarakat dalam proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Literatur komunikasi pembangunan menegaskan bahwa konflik sering kali muncul ketika kelompok masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang membuka ruang partisipasi melalui forum publik, musyawarah komunitas, atau media partisipatif dapat mengurangi ketegangan dan membangun rasa kepemilikan bersama terhadap solusi konflik.

Partisipasi juga berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran sosial. Ketika masyarakat terlibat dalam proses komunikasi, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen makna yang aktif. Proses ini memungkinkan terjadinya pertukaran perspektif antaraktor konflik, sehingga konflik tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pertentangan kepentingan, melainkan sebagai persoalan bersama yang membutuhkan

solusi kolektif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan keberlanjutan perubahan sosial.

b. Dialog dan Komunikasi Dua Arah

Dialog dan komunikasi dua arah merupakan fondasi penting dalam komunikasi pemberdayaan. Berbagai literatur menekankan bahwa konflik sosial sering kali diperparah oleh komunikasi satu arah yang bersifat dominatif, di mana aktor yang memiliki kekuasaan menentukan narasi tanpa membuka ruang respons bagi masyarakat. Pendekatan dialogis menempatkan semua pihak yang terlibat konflik sebagai aktor yang setara dalam proses komunikasi, sehingga memungkinkan terbangunnya saling pengertian dan kepercayaan.

Komunikasi dua arah memungkinkan klarifikasi informasi, penyampaian aspirasi, serta negosiasi makna yang lebih adil. Dalam konteks konflik sosial, dialog berfungsi untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mempertemukan kepentingan yang berbeda, dan merumuskan solusi yang dapat diterima bersama. Literatur komunikasi pembangunan menegaskan bahwa dialog yang berkelanjutan lebih efektif dalam meredam konflik dibandingkan komunikasi persuasif yang bersifat sepihak dan jangka pendek. Dengan demikian, dialog tidak hanya berfungsi sebagai alat resolusi konflik, tetapi juga sebagai sarana membangun relasi sosial yang lebih inklusif.

c. Pendekatan Berbasis Komunitas

Pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting dalam komunikasi pemberdayaan karena konflik sosial selalu berakar pada konteks lokal yang spesifik. Literatur menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang mengabaikan nilai, budaya, dan struktur sosial komunitas cenderung gagal atau bahkan memperburuk konflik. Pendekatan berbasis komunitas menempatkan masyarakat lokal sebagai pusat proses komunikasi, dengan mengakui pengetahuan lokal, norma sosial, serta dinamika relasi yang ada di dalam komunitas.

Dalam pendekatan ini, komunikasi dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas, baik melalui tokoh lokal, media komunitas, maupun praktik komunikasi tradisional. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan strategi pengelolaan konflik yang lebih kontekstual dan berkelanjutan, karena solusi yang dihasilkan berasal dari dalam komunitas itu sendiri. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat kapasitas komunitas untuk mengelola konflik secara mandiri di masa depan, sehingga tidak selalu bergantung pada intervensi eksternal.

d. Literasi Media sebagai Strategi Pemberdayaan

Literasi media merupakan strategi pemberdayaan yang semakin relevan dalam mengelola konflik sosial, terutama di era media digital. Literasi media tidak hanya mencakup kemampuan mengakses informasi, tetapi juga kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi pesan media secara kritis. Literatur menunjukkan

bahwa rendahnya literasi media berkontribusi pada penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang dapat mempercepat eskalasi konflik sosial.

Dalam perspektif komunikasi pembangunan, literasi media berfungsi sebagai alat untuk memperkuat daya kritis masyarakat terhadap representasi konflik di media. Masyarakat yang memiliki literasi media yang baik cenderung lebih mampu memahami framing media, membedakan informasi faktual dan manipulatif, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi konflik yang sensasional. Dengan demikian, literasi media tidak hanya berperan dalam pencegahan konflik, tetapi juga dalam membangun budaya komunikasi yang lebih etis, dialogis, dan berorientasi pada perdamaian.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat, dialog dua arah, pendekatan berbasis komunitas, dan literasi media menunjukkan bahwa pengelolaan konflik sosial membutuhkan pendekatan komunikasi yang holistik dan berkelanjutan. Strategi ini menegaskan peran komunikasi pembangunan sebagai instrumen perubahan sosial yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif.

D. Tantangan Implementasi Komunikasi Pemberdayaan

Meskipun strategi komunikasi pemberdayaan memiliki potensi besar dalam mengelola konflik sosial, berbagai literatur menunjukkan bahwa implementasinya tidak terlepas dari sejumlah tantangan struktural dan kultural. Tantangan-tantangan ini sering kali menghambat efektivitas komunikasi pembangunan dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Empat tantangan utama yang banyak dibahas dalam literatur meliputi bias media, kepentingan politik dan ekonomi, rendahnya literasi komunikasi, serta ketimpangan akses media.

a. Bias Media

Bias media merupakan salah satu tantangan paling signifikan dalam implementasi komunikasi pemberdayaan. Literatur komunikasi menegaskan bahwa media tidak pernah sepenuhnya netral, karena proses produksi pesan selalu dipengaruhi oleh nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Dalam konteks konflik sosial, bias media sering muncul dalam bentuk framing yang tidak berimbang, pemilihan narasumber yang selektif, serta penekanan berlebihan pada aspek sensasional konflik. Kondisi ini berpotensi mengaburkan akar permasalahan konflik dan melemahkan upaya komunikasi yang bersifat dialogis dan memberdayakan.

Bias media juga dapat menciptakan ketimpangan representasi kelompok sosial tertentu. Kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap media cenderung mendapatkan ruang suara yang lebih dominan, sementara kelompok marjinal sering kali terpinggirkan. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, situasi ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan yang menempatkan semua kelompok masyarakat sebagai subjek

komunikasi. Akibatnya, komunikasi pemberdayaan sulit dijalankan secara optimal ketika media justru memperkuat relasi kuasa yang timpang dalam konflik sosial.

b. Kepentingan Politik dan Ekonomi

Kepentingan politik dan ekonomi menjadi tantangan struktural yang kuat dalam implementasi komunikasi pemberdayaan. Banyak literatur menunjukkan bahwa media dan institusi komunikasi pembangunan sering berada dalam tekanan kepentingan elite politik dan pemilik modal. Dalam situasi konflik sosial, kepentingan ini dapat memengaruhi arah pemberitaan, narasi yang dikonstruksi, serta strategi komunikasi yang digunakan. Komunikasi yang seharusnya mendorong dialog dan pemberdayaan masyarakat berisiko berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan atau kepentingan ekonomi tertentu.

Selain itu, intervensi politik dalam komunikasi pembangunan sering kali menghasilkan pendekatan yang bersifat instrumental dan jangka pendek. Strategi komunikasi lebih difokuskan pada stabilitas dan citra, bukan pada pemberdayaan dan penyelesaian konflik secara substantif. Literatur komunikasi pembangunan mengkritik pendekatan ini karena mengabaikan akar struktural konflik dan mengurangi ruang partisipasi masyarakat. Akibatnya, konflik sosial mungkin mereda secara temporer, tetapi berpotensi muncul kembali dalam bentuk yang lebih kompleks.

c. Rendahnya Literasi Komunikasi

Rendahnya literasi komunikasi masyarakat juga menjadi tantangan penting dalam implementasi komunikasi pemberdayaan. Literasi komunikasi mencakup kemampuan individu dan kelompok untuk memahami pesan, menafsirkan makna, serta berpartisipasi secara kritis dalam proses komunikasi. Dalam konteks konflik sosial, rendahnya literasi komunikasi membuat masyarakat rentan terhadap disinformasi, hoaks, dan narasi provokatif yang beredar melalui media massa maupun media digital.

Literatur menunjukkan bahwa masyarakat dengan literasi komunikasi yang rendah cenderung menjadi konsumen pasif informasi dan sulit terlibat dalam dialog yang konstruktif. Kondisi ini menghambat tujuan komunikasi pemberdayaan yang menekankan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan konflik. Tanpa peningkatan literasi komunikasi, strategi komunikasi pemberdayaan berisiko tidak efektif karena pesan-pesan dialogis dan edukatif tidak dapat diterima atau dipahami secara optimal oleh masyarakat sasaran.

d. Ketimpangan Akses Media

Ketimpangan akses media merupakan tantangan lain yang memperlemah implementasi komunikasi pemberdayaan. Ketimpangan ini mencakup perbedaan akses terhadap infrastruktur komunikasi, teknologi digital, serta sumber informasi yang berkualitas. Dalam banyak konteks pembangunan, kelompok masyarakat di wilayah terpencil atau dengan kondisi sosial-ekonomi rendah masih menghadapi keterbatasan

akses terhadap media. Akibatnya, mereka tidak memperoleh informasi yang memadai dan sulit berpartisipasi dalam proses komunikasi terkait konflik sosial.

Literatur komunikasi pembangunan menegaskan bahwa ketimpangan akses media berkontribusi pada eksklusi sosial dan memperbesar kesenjangan komunikasi. Strategi komunikasi pemberdayaan yang tidak mempertimbangkan kondisi ini berpotensi hanya menjangkau kelompok tertentu, sementara kelompok lain tetap terpinggirkan. Oleh karena itu, upaya mengelola konflik sosial melalui komunikasi pemberdayaan perlu disertai dengan kebijakan dan strategi yang memperluas akses media secara adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi komunikasi pemberdayaan dalam mengelola konflik sosial tidak hanya bergantung pada desain strategi komunikasi, tetapi juga pada konteks struktural dan kultural yang melingkupinya. Menghadapi bias media, kepentingan politik dan ekonomi, rendahnya literasi komunikasi, serta ketimpangan akses media, komunikasi pembangunan dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih reflektif, kritis, dan kontekstual agar tujuan pemberdayaan dan perubahan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan perubahan sosial. Dalam perspektif komunikasi pembangunan, konflik tidak semata-mata dipahami sebagai kegagalan pembangunan, melainkan sebagai indikator adanya ketimpangan komunikasi, partisipasi, dan distribusi informasi di masyarakat. Media memiliki peran strategis dalam dinamika konflik sosial, baik sebagai penyampai informasi, pembentuk opini publik, maupun sebagai aktor yang berpotensi memperkuat atau meredam konflik. Sementara itu, strategi komunikasi pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat, dialog dua arah, pendekatan berbasis komunitas, dan literasi media dipandang sebagai pendekatan yang relevan dan berkelanjutan dalam mengelola konflik sosial.

Secara teoretis, temuan dalam literature review ini menegaskan pentingnya integrasi antara kajian media, konflik sosial, dan komunikasi pemberdayaan dalam kerangka komunikasi pembangunan. Komunikasi tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai alat penyampaian pesan pembangunan, tetapi sebagai proses sosial yang dialogis dan berorientasi pada pemberdayaan. Perspektif ini memperkaya pengembangan teori komunikasi pembangunan dengan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan komunikasi dalam mengelola perbedaan, merespons konflik, dan mendorong perubahan sosial yang inklusif.

Dari sisi praktis, hasil kajian ini memberikan implikasi bagi pengelolaan konflik sosial, khususnya bagi pembuat kebijakan, praktisi komunikasi, dan media. Media diharapkan dapat menjalankan fungsi komunikasinya secara lebih berimbang, edukatif, dan sensitif

terhadap konteks sosial konflik. Strategi komunikasi pembangunan perlu dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Selain itu, penguatan literasi media dan komunikasi menjadi langkah penting untuk mencegah eskalasi konflik akibat disinformasi dan narasi provokatif, terutama di era media digital.

Meskipun demikian, artikel ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan sumber literatur tanpa melibatkan data empiris lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan literature review dengan studi kasus atau penelitian empiris guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai peran media dan strategi komunikasi pemberdayaan dalam konflik sosial. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi secara lebih spesifik konteks lokal di Indonesia, termasuk peran media digital dan kelompok generasi muda, agar kajian komunikasi pembangunan semakin relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Daftar Pustaka

- Bar-Tal, D. (2000). From Intractable Conflict Through Conflict Resolution To Reconciliation: Psychological Analysis. *Political Psychology*, 21(2), 351–365. <https://doi.org/10.1111/0162-895X.00192>
- Besio, C., Hungerbühler, R., Morici, L., & Prario, B. (2008a). The Implementation of the Quota Requirements of the Directive 'Television Without Frontiers'. *International Communication Gazette*, 70(2), 175–191. <https://doi.org/10.1177/1748048507086912>
- Besio, C., Hungerbühler, R., Morici, L., & Prario, B. (2008b). The Implementation of the Quota Requirements of the Directive 'Television Without Frontiers'. *International Communication Gazette*, 70(2), 175–191. <https://doi.org/10.1177/1748048507086912>
- Haddaway, N. R., Collins, A. M., Coughlin, D., & Kirk, S. (2015). The Role of Google Scholar in Evidence Reviews and Its Applicability to Grey Literature Searching. *PLOS ONE*, 10(9), e0138237. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138237>
- Mefalopulos, P. (2008). *Development Communication Sourcebook*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7522-8>
- Prensky, M. (2012). *From Digital Natives to Digital Wisdom: Hopeful Essays for 21st Century Learning*. Corwin Press. <https://doi.org/10.4135/9781483387765>
- Ruback, R., & Thompson, M. (2015). *Social and Psychological Consequences of Violent Victimization*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483345413>
- Servaes, J. (Ed.). (2020). *Handbook of Communication for Development and Social Change*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-7035-8>

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Wilkins, K. G., Tufte, T., & Obregon, R. (Eds.). (2014). *The Handbook of Development Communication and Social Change*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118505328>
- Willia Novi Aryani, Adelia Irma Artika, Agi Bara Firdaus, Ahmad Jazily, Andrilia Agustin, Dimas Retyo Alfaozi, Gabriel Al Fathurrazaq Rusdi, Sindi Fitri Maulidia, Sylfiana Hidayatun Nikmah, Tubagus Satria Jaya, & Wahidah Zahra. (2025). Digitalisasi dan Pembangunan Sosial: Perspektif Sosiologi terhadap Transformasi Masyarakat di Era Teknologi. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(6), 367–380. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1306>